

**Keamanan dan Pertahanan dari Aspek Sistem Keamanan Nasional Indonesia
(Security and Defense from The Aspect of Indonesia's National Security System)**

¹Isti Puspitasari, ²Irwan Triadi

Mahasiswa Magister Hukum Upn Veteran Jakarta
email : ¹istipuspitasari84@gmail.com, ²irwantriadi@yahoo.com

Received: September 2023 / Revised: Oktober 2023 / Accepted: Desember 2023

ABSTRAK :

Ketahanan nasional adalah keadaan suatu negara yang selalu berubah dan melindungi semua aspek kehidupannya dari ancaman. Pertahanan dan keamanan negara, masyarakat, dan individu adalah bagian dari ketahanan nasional. Pada saat ini, para ilmuwan telah memberikan beberapa definisi yang berkaitan dengan konsep keamanan dan pertahanan. Sangat penting untuk memahami berbagai ancaman dan kesulitan yang ada di bidang keamanan dan pertahanan saat ini. Selain itu, penting juga untuk menjelaskan bagaimana penelitian tentang ketahanan nasional sebanding dengan penelitian tentang pembentukan sistem keamanan nasional di negara lain. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini bergantung pada penelusuran literatur dan wawancara. Selain itu, penelitian ini menyelidiki jenis masalah yang umum di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah ketidaksetaraan terhadap perbedaan dan masalah perbatasan, agama, kebangsaan, ras, dan golongan (SARA), ketidakadilan dalam reformasi birokrasi, kekurangan polisi, dan tingginya tingkat kriminalitas dan kejahatan transnasional. Peraturan yang mengatur keamanan dan perlindungan, serta ide, lembaga, dan konstitusi yang digunakan, membedakannya. Kemampuannya dalam melindungi dan memelihara keamanan sangat penting bagi kedaulatan suatu negara, seperti yang ditunjukkan oleh pasal tersebut.

Kata Kunci : Keamanan, pertahanan negara, perspektif, kemandirian nasional.

ABSTRACT :

National resilience is the state of a nation that is constantly changing, covering all sectors of life in the face of threats that may occur at any time. National security includes the defense and security of the country, society and individuals. At this time, scientists have provided several explanations regarding the definitions related to the concept of security and defense. Current threats and challenges to security and defense take different forms and need to be understood. Furthermore, it is also important to explain the similarities and differences between national resilience studies that aim to build a national security system and the development of security systems in other countries. The type of research used in this research is descriptive qualitative research. This approach is based on literature search and interviews. This research also examines the form of problems that often occur in Indonesia. Among them are border problems, intolerance towards differences in religion, nationality, race and class (SARA), injustice in the implementation of bureaucratic reforms, a lack of police officers and a high level of crime and transnational crime. The differences and similarities between the concepts of security and protection are found in the legal norms that govern them, as well as in the concepts, institutions and constitutions used. From this article it can be concluded that the sovereignty of a country depends on its ability to protect and maintain security.

Keywords: Security, national defense, perspective, national independence.

PENDAHULUAN

Pada akhir Perang Dunia II, Negara dianggap sebagai aktor keamanan utama. Tujuan utama pencapaian keamanan adalah untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga stabilitas ekonomi, menyediakan layanan sosial yang memadai, memperhatikan kesehatan dan pendidikan, mengutamakan peraturan perundang-undangan yang adil, mengurangi pengangguran dan meningkatkan infrastruktur. Selain itu, Negara juga berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, politik, sosial dan budaya masyarakat. Keselamatan yang berasal dari bahasa Latin dapat diartikan sebagai kondisi terbebas dari bahaya, paksaan, dan ancaman. Ada dua pendekatan dalam security sharing, yaitu pendekatan tradisional. Keamanan tradisional ini berkaitan dengan perlindungan negara dari intervensi militer negara lain dan partisipasi kekuatan militer untuk melindunginya. Untuk mencapai keamanan, digunakan dua pendekatan: pendekatan tradisional dan pendekatan non-tradisional. Keamanan non-tradisional ini berfokus pada keamanan yang diinginkan oleh individu, bukan oleh Negara.

Pertahanan negara diartikan sebagai sarana utama untuk digunakan oleh suatu negara dalam rangka mencapai keamanan nasional. Konsep "keamanan nasional" diperkenalkan pada tahun 1940 tentunya dengan mempertimbangkan aspek-aspek teritorial, kedaulatan, dan sosial. Negara memiliki tanggung jawab dan hak untuk menciptakan keamanan nasional agar pertahanan negara dianggap sebagai sektor yang paling penting oleh masyarakat. Mendanai keamanan nasional adalah sangat penting karena hal ini dapat menciptakan kondisi yang diperlukan bagi stabilitas negara, pembangunan ekonomi dan sosial, politik, layanan kesehatan dan sistem demokrasi yang kuat.

Bambang Pranowo berkata: "Ketahanan nasional ialah keadaan dinamik sebuah negara yang merangkumi semua aspek kehidupan berbangsa yang boleh dibangun dan disepadukan bagi menghadapi segala bentuk ancaman, cabaran, gangguan dan rintangan (ATGH). Konsep ketahanan nasional ialah konsep Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penerapan dimana sila ketiga Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dapat diartikan sebagai negara kesatuan (M. Bambang Pranowo, 2010: 6).

Sebagai prasyarat, ketahanan nasional ditakrifkan sebagai prasyarat untuk kehidupan negara yang disintesis, disinergikan dan dibangun melalui pembangunan kekuatan negara untuk mencapai matlamat dan cita-cita negara. Secara konsep, ketahanan nasional merupakan asas strategik untuk mengatasi masalah strategik negara melalui pendekatan kehidupan berbangsa (astagatra) yang merangkumi 3 ciri statik (trigatra) dan 5 aspek kehidupan dinamik (pancagatra) dengan penjelasannya ialah :

Untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional, ketahanan nasional dapat didefinisikan sebagai pengembangan kekuatan nasional yang menyeluruh, sinergis, dan berkelanjutan untuk memajukan kehidupan bernegara. Secara konseptual, ketahanan nasional berfungsi sebagai landasan strategis untuk mengatasi masalah strategis negara. Ini dicapai melalui pendekatan kehidupan nasional (Astagatra), yang terdiri dari tiga dimensi alam statis (Trigatra) dan lima dimensi kehidupan dinamis (Pancagatra), yang masing-masing berkaitan dengan kehidupan. Ini dapat dijelaskan dengan mengatakan :

Untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional, ketahanan nasional dapat didefinisikan sebagai pengembangan kekuatan nasional yang menyeluruh, sinergis, dan berkelanjutan untuk memajukan kehidupan bernegara. Secara konseptual, ketahanan nasional berfungsi sebagai landasan strategis untuk mengatasi masalah strategis negara. Ini dicapai melalui pendekatan kehidupan nasional (Astagatra), yang terdiri dari tiga dimensi alam statis (Trigatra) dan lima dimensi kehidupan dinamis (Pancagatra), yang masing-masing berkaitan dengan kehidupan. Ini dapat dijelaskan dengan :

1. “Gatra Alami (statis)
 - a. Geografi Gatra
“Lokasi geografi Indonesia, yang merentasi sempadan negara, memberikan sumbangan yang sangat strategik kepada dorongan global”.
 - b. Demografi Gatra
“Demografi merujuk kepada populasi berdasarkan kualiti, kuantiti, kadar pertumbuhan, komposisi, kebajikan, dan pemetaan penduduk.”.
 - c. Sumber Gatra
“Sumber daya alam yang dipunyai oleh Indonesia berasal dari seluruh sumber daya alam (SKA) terbagi kedalam 3 (tiga) kelompok diantaranya SKA terbarukan, SKA tidak terbarukan, dan SKA permanen.”.
2. “Gatra Sosial (dinamis)
 - a. Ideologi Gatra
“Ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi seberapa kuat keyakinan seseorang. Salah satunya adalah banyaknya ragam masyarakat di Indonesia yang berarti banyak sekali perbedaan ide dan pendapat. Hal lainnya adalah bahwa ide-ide dari seluruh dunia dapat menyebar dan mempengaruhi keyakinan masyarakat. Dan yang terakhir, pertumbuhan dan perubahan suatu negara juga dapat mempengaruhi keyakinan masyarakat”.
 - b. Politik Gatra
“Salah satu aspek kehidupan nasional adalah politik, yang mencakup hak rakyat untuk memerintah dan menyuarakan pendapat mereka untuk memberikan kedaulatan kepada rakyat”.
 - c. Ekonomi Gatra
“Perekonomian adalah bagian kehidupan negara yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa”.
 - d. Gatra Sosial Budaya
“Salah satu cara untuk melihat ketahanan sosial budaya yang digunakan sebagai alat untuk mencegah orang asing melakukan cara-cara yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia adalah melalui proses sosialisasi”.
 - e. Pertahanan dan keamanan Gatra
“Memelihara kedaulatan negara, menghadapi ancaman, hambatan, dan gangguan (ATGH) baik di dalam maupun di luar negeri, dan menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan kemampuan pertahanan dan keamanan Negara (Lemhannas, 2016: 63-64).

Ada 2 (dua) sudut pandang berbeda dapat digunakan untuk menggambarkan keamanan nasional. Yang pertama adalah sudut pandang tingkat domain, yang meliputi keamanan nasional, keamanan dalam negeri, keamanan umum, dan keamanan perbatasan. Selain itu, perspektif keamanan nasional perlu mempertimbangkan keamanan nasional, keamanan komunitas, dan keamanan individu. Tujuan kesejahteraan manusia adalah meningkatkan kesejahteraan nasional dengan tiga aspek utama: pertimbangan terhadap individu dan kelompok dalam bangsa; kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, termasuk situasi dimana kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan tidak selalu ada; perlindungan terhadap faktor kesejahteraan secara keseluruhan diperluas kepada bangsa; dan mencapai kesejahteraan manusia tidak hanya berarti melindungi masyarakat secara keseluruhan, namun juga mendorong masyarakat secara keseluruhan untuk menjaga diri mereka sendiri.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, memberikan penjelasan tentang keamanan manusia dapat dilakukan melalui pendekatan komprehensif dalam mengatasi resiko dan penyebab mendasar dari masalah tersebut, diantaranya adalah :

1. “Ketidakamanan ekonomi berarti kemiskinan dan sulitnya mengupayakan untuk hidup nyaman, tidak mampu mendapatkan pekerjaan, dan tidak ada meminjam uang atau mencari cara lain untuk peluang ekonomi lainnya;
2. Kerawanan pangan berarti tidak adanya cukup penduduk yang mempunyai cukup makanan untuk dimakan. Salah satu penyebabnya adalah harga pangan yang semakin tinggi;
3. Ketidakamanan kesehatan berarti adanya hal-hal yang dapat membuat seseorang yang tidak dilakukan pencegahan untuk menghindari datangnya penyakit, seperti ketika banyak orang tertular penyakit yang sama. Hal ini juga dapat berarti bahwa masyarakat tidak mempunyai cukup makanan yang baik untuk dimakan, atau mereka tidak dapat menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Terkadang, sulit bagi orang untuk pergi ke tempat di mana mereka bisa mendapatkan pertolongan ketika mereka sakit;
4. Ketidakamanan lingkungan berarti adanya permasalahan lingkungan hidup yang dapat merugikan. Hal ini mencakup hal-hal seperti merusak alam, menghabiskan terlalu banyak sumber daya tanpa adanya upaya pencegahan, pemulihan, serta penegakan hukum yang tegas atas pengerusakan alam hal tersebutlah yang dapat menyebabkan bencana besar yang disebabkan oleh alam;
5. Ketidakamanan perorangan berarti bentuk-bentuk kekerasan terhadap fisik orang, perdagangan orang dan mempekerja anak demi mengupayakan upah murah;
6. Keresahan masyarakat berarti konflik suku dan agama, SARA dan terorisme;
7. Kerentanan dalam politik menyebabkan ketidakstabilan politik, pelanggaran HAM dan tidak adanya disiplin hukum (UNTFHS, 2016: 7).

Daripada perspektif PBB di atas, objektif keselamatan berubah daripada tradisional kepada bukan tradisional, di mana pada awalnya ia merangkumi unsur kedaulatan negara dan wilayah dari aspek keselamatan manusia dalam bentuk memberikan perlindungan kepada semua rakyat dari perspektif ekonomi, melindungi (HAM) dan sekitar kita. Kehidupan keselamatan berpaksikan masyarakat boleh difahami sebagai keperluan untuk semua orang dilindungi daripada ancaman, halangan dan tantangan, termasuk kemiskinan, penindasan, wabah, kekurangan pendidikan dan krisis ekonomi. Indonesia masih banyak memikirkan tentang keselamatan dan pertahanan, dimana negara kita masih belum mempunyai dasar keselamatan negara yang sah, maka sikap mementingkan diri peringkat industri sering timbul apabila ancaman keselamatan timbul.

Terkait dengan topik yang dibahas dalam artikel ini, penulis terus membahas ancaman keamanan dan pertahanan Indonesia saat ini serta persamaan dan perbedaan konsep keamanan dan pertahanan dalam konteks kajian ketahanan dalam negeri. Kajian ini juga mengkaji perkembangan dalam sistem keamanan negara lain, terutamanya Kesatuan Eropa, Jepang dan Turki. Negara-negara ini telah mewujudkan struktur penyelarasan dengan Badan Keselamatan Negara mereka untuk membincangkan hal tuju pengurusan ancaman dalam melaksanakan sistem keselamatan negara. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dan dapatan kajian untuk mengharmonikan pemahaman keselamatan dan pertahanan dalam kalangan pembuat dasar dan kawal selia dalam konteks keselamatan negara. Sebagaimana tujuan penelitian kali ini membahas tentang ketahanan nasional dimana tujuannya adalah untuk membangun sistem keamanan nasional yang dapat menjaga dan melindungi kedaulatan negara.

PERMASALAHAN

Rumusan masalah yang di bahas dalam artikel/penelitian ini adalah :

1. Apa manfaat dalam mempelajari sistem keamanan dan pertahanan nasional Indonesia?
2. Apa saja ancaman keamanan dan pertahanan Indonesia saat ini dan apa persamaan serta perbedaan antara konsep keamanan dan pertahanan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk mengilustrasikan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana temuan penelitian ini bersifat deskriptif (penjelasan). Dalam pandangan Newman, penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran rinci tentang suatu situasi, lingkungan sosial, atau hubungan. Penelitian yang disajikan dalam artikel ini juga menggambarkan upaya pemerintah untuk menjamin keamanan nasional. Selanjutnya, putuskan siapa yang akan memiliki peran dan fungsi dalam penerapan keamanan.

Penelusuran literatur ini dilakukan untuk artikel/kajian dengan menggunakan 4 hal terkait ketahanan nasional diantaranya adalah :

- 1) Ketentraman;
- 2) Pengamanan;
- 3) Pertahanan Dalam Negeri; dan
- 4) Kepentingan Nasional.

Penulis artikel/studi ini fokus pada sumber data primer. Sumber data primer berasal dari rujukan-rujukan kepustakaan yang berkaitan langsung dengan bahasan keamanan dan pertahanan sistem keamanan nasional indonesia dan data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan serupa yang menjadi rujukan riview (termasuk buku dan media elektronik). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei bibliografi berdasarkan hasil tinjauan pustaka yang relevan.

PEMBAHASAN

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang tersusun dari 17.000 pulau dan merupakan negara terbesar ke-4 didunia serta merupakan negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Letaknya yang strategis di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem perekonomian dunia. Oleh kerana lokasi geografinya, Indonesia bersempadan dengan 10 negara tetangga di Kawasan Asia, menjadikannya riskan kepada sengketa perbatasan dan ancaman keselamatan. Berdasarkan Plan Ketahanan Nasional, usaha kerajaan untuk menjamin keselamatan dan pertahanan dengan Minimum Essential Force (MEF), tahap input dan penempatan industri pertahanan tertumpu kepada 3 (tiga) objektif utama pembangunan keamanan dan pertahanan, yaitu satu. antaranya ialah pencegahan dan penindakan penyalahgunaan narkotik dan jual beli. Presiden Joko Widodo, dengan sokongan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, melantik wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Direktur Pembangunan Industri Pertahanan Strategis Nasional (Andhika Prasetia, drtik.com).

Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, menyatakan bahwa kerjasama antara BUMN dan swasta diperlukan untuk memajukan industri dalam negeri, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang No. 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan. Ini menjelaskan mengapa Perusahaan Milik Negara (BUMN) harus mendukung industri ini karena BUMN mengeluarkan peralatan industri penting dan peralatan swasta yang mendukung industri pertahanan dengan menyediakan bahan mentah (Egi Adyatama, tempo.co)".

"Negara Indonesia mempunyai beberapa jenis ancaman terutama ekstremisme yang mempengaruhi integrasi wilayah nasional," Wawancara Puzi Astuti, Dengan Pemerhati Pertahanan Kementerian Pertahanan. Selain memfokuskan isu keselamatan dan keamanan, TNI juga memainkan peranan penting dalam pengesanan awal ancaman. Pada masa ini, terdapat pertikaian sempadan antara Malaysia dan Papua New Guinea, Timor Timur, Filipina, Malaysia, Singapura, Australia, China dan Thailand nampaknya tidak dapat diselesaikan. Sengketa wilayah menyebabkan pembentukan pulau Ligitan dan Sipadan Ini menunjukkan bahawa masyarakat Indonesia kurang mengetahui perkembangan strategik alam sekitar yang memberi kesan kepada

ancaman pelanggaran kedaulatan wilayah Indonesia, penangkapan ikan secara ilegal, penyeludupan, penambangan illegal dan perdagangan orang. Insiden separatisme di Papua tidak jauh berbeda dengan insiden di kawasan konflik yang lain (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2019: 206).

Decky Wospakrik berkata : “Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak berpuas hati dengan dasar kebijakan Pemerintah Negara Indonesia kerana Papua masih merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penentangan OPM Pemerintahan Negara Indonesia untuk memisahkan diri daripada Republik Indonesia masih terjadi. Penentangan dan perjuangan OPM masih terjadi di berbagai wilayah Papua antara tahun 1967 hingga 2001. Ini diikuti dengan tembakan di kawasan pergunungan yang dengan sengaja menghancurkan dan mengancam keselamatan masyarakat di Papua (BBC News).”

Perkembangan pesat gangguan ketentraman dan peningkatan ancaman peperangan yang tidak konvensional adalah dua contoh potensi ancaman bagi keselamatan masa depan Indonesia. Selain itu, ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat, China, dan negara-negara anggota ASEAN telah menyebabkan konflik yang lebih luas di Laut China Selatan. Sementara itu, masih ada ancaman di dalam negeri, seperti pemisahan kelompok separatisme bersenjata di Papua dan bencana alam yang telah menewaskan banyak orang.

Saat ini, TNI sebagian besar belum memiliki alusista modern 4.0 hingga 5.0 jet tempur, rudal, peluru kendali, kapal perusak, dan radar yang diperlukan. Kemampuan untuk membeli teknologi dan mengintegrasikan sistem sangat terbatas. Ancaman dunia maya selanjutnya berasal dari kemajuan teknologi digital, yang dikenal sebagai teknologi hibrid terbaru. Teknologi hibrid ini dapat menyebabkan kekacauan, spionase negara, stagnasi ekonomi, dan ketidakpercayaan negara. Di antara ancaman serangan dunia maya yang terjadi pada tahun 2018 adalah 4.444 (31,71%), serangan pencurian data (jaringan trojan), 223 (22,91%), serangan peretasan sistem (hak akses pengguna), dan serangan yang bertujuan melumpuhkan sistem dengan program denial of service (DoS). 10,79%, dan upaya pembocoran informasi dan data 12,62%. Persamaan dan perbedaan dalam konsep pengamanan dan pertahanan bisa dilihat dalam susunan institusi dan bentuk konsep yang digunakan dalam pelaksanaannya.

Pengamat pertahanan Sri Multiningsih dari Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa persamaan antara keamanan dan pertahanan didasarkan pada konsep dan regulasi yang ada. Konsep keamanan dan pertahanan yang berlandaskan undang-undang bertumpu pada Pancasila sebagai landasan negara, dengan menerapkan segala prinsip yang terkandung di dalamnya. Konsep dasar yang digunakan dalam bidang kemananan dan pertahanan, serta dalam Pasal 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, adalah sumbernya. Di Indonesia, istilah "pengamanan", "keamanan", dan "pertahanan" berbeda karena mereka mempertimbangkan hukum, konstitusi, dan aturan institusi. Berdasarkan TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang peranannya, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang TNI dan Polri, implikasi keamanan dan pertahanan bagi setiap organisasi diatur dalam, seperti UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, menetapkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Prinsip pembangunan pertahanan dan ketahanan meliputi prinsip meweujudkan nilai-nilai kesejahteraan dan keamanan, prinsip kekeluargaan, prinsip wawasan, nilai-nilai kebangsaan dan prinsip inklusi. Hakikat ketahanan nasional terletak pada pengaturan dan penyelenggaraan keamanan berbasis keluarga yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kecerdasan, kerjasama, dan tanggung jawab kolektif serta meningkatkan taraf hidup berdasarkan nilai kemandirian, pelaporan, dan sentralitas.

Karena banyak faktor, "Ketahanan ideologi belum kuat," kata Dadan Umar Daihani, Direktur Labukrtanas Lemhanas. Bermula dari ideologi dasar negara Indonesia Pancasila, kami

memeriksa ideologi lain berdasarkan empat faktor: diskusi antar umat beragama, dinamika konflik, dan dinamika demokrasi secara keseluruhan. Daya tahan dan kekuatan fisik Salah satu tanda kurangnya ketahanan sosial budaya adalah kurangnya rasa hormat terhadap orang lain, kurangnya ketertiban dan kontrol sosial di tempat umum, dan banyaknya berita palsu, hoaks, dan misinformasi yang dievaluasi dari perspektif pemerintah, ekonomi, perdagangan narkoba ilegal, dan pendidikan. peningkatan dan sebagainya. Sebagai variabel yang mengukur seberapa intens konflik pada PNS”.

Didalam UUD 1945, TNI dan Polri tidak hanya bersama-sama menjamin keamanan nasional, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh kementerian, institusi pemerintahan pusat dan wilayah daerah serta masyarakat adalah berkaitan dan bertanggungjawab terhadap penyertaan mereka. Usaha negara ini dilaksanakan atas sokongan rakyat (sishankamrata). Institusi negara melalui kementerian, institusi, pemerintahan pusat dan wilayah serta badan bukan pemerintah mestilah tunduk pada kepentingan negara bagi merealisasikan tujuan dan cita-cita negara. Memandang ancaman yang semakin meningkat terhadap keselamatan, keamanan dan pertahanan Indonesia, sistem keselamatan dan keamanan negara memerlukan payung hukum berupa undang-undang. Pada masa ini, negara Indonesia sudah mempunyai undang-undang mengenai badan keamanan, tetapi pelaksanaannya tidak diselaraskan. Oleh itu, Indonesia, seperti banyak negara lain, perlu melaksanakan Undang-undang Keamanan Negara bersama-sama dengan pembentukan Dewan Keamanan Negara. Pembangunan keamanan dan pertahanan negara di berbagai negara, termasuk Kesatuan Eropa, Turki dan Jepang.

Menurut Komisi Keamanan Eropa, UE mempunyai tiga keutamaan utama program Pembangunan Keselamatan Strategik lima tahunnya untuk 2015-2020 terorisme, kejahatan terorganisir, dan kejahatan saiber. Pertama, Pertama, serangan tindakan terorisme di Eropa (Paris, Copenhagen, Brussels) dapat mengancam keamanan dalam negeri. Kedua, memerangi kejahatan terorganisir internasional, termasuk perdagangan manusia, perdagangan senjata terlarang, perdagangan narkotika, campur tangan pasar keuangan, dan perusakan lingkungan. Ketiga, memberantas kejahatan saiber, ancaman yang semakin meningkat apabila perdagangan dan perbankan memasuki dunia online dan digital, dapat mengakibatkan kerugian besar. Kejahatan dunia digital boleh datang dari luar Eropa untuk memusnahkan infrastruktur penting. Ancaman dan gangguan terorisme mnedunia maya melalui ajakan-ajakan idologis serta hasutan juga ancaman hybrid dapat menggunakan teknologi anonimisasi dan mekanisme anonimasi dan mekanisme pembayaran tanpa nama untuk tujuan seperti penyeludupan narkotika dansenjata, dari ancaman kejahatan tersebut meningkatkan transaksi pencucian uang, kemampuan menyiarkan secara langsung, dan kecenderungan kekerasan terhadap anak-anak. Korban anak-anak. Eksploitasi seksual.

Pada dasarnya, setiap negara memiliki cara mereka sendiri untuk mempertahankan pertahanan dan keamanannya di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial. Beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat, menyikapinya dengan keterbukaan, sementara negara lain, seperti Republik Rakyat China, mengenakan batasan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi digital. Sementara Indonesia, sebagai negara yang sah dan berdaulat, secara teratur menangani setiap dasar perkembangan yang sesuai dengan harmonisasi undang-undang dan perundangan (Yoyon Mulyana Darusman, 2022).

Negara Jepang, berdasarkan konstitusinya, memegang prinsip ideologi pertahanan dan keamanan kekuatan militer yang mengancam negara lain, tetapi pada hakikatnya telah menciptakan kekuatan pertahanan yang komprehensif dan efektif yang hanya berfokus pada pertahanan. Tugas pertahanan negara sepenuhnya menjadi tugas eksekutif. Jepang telah merumuskan Strategi Keamanan Nasional (NSS), yaitu strategi keamanan yang secara aktif mengedepankan kebijakan damai untuk mengatasi masalah utama keamanan nasional. Pendekatan strategis terhadap keamanan nasional meliputi:

1. Tujuan Meningkatkan kapasitas dan peran Jepang;
2. Memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat;
3. Aktif mendukung perdamaian dan stabilitas di dunia internasional;
4. Untuk menyelesaikan masalah, memperkuat hubungan bilateral dan multilateral.

Negara-negara Turki adalah bagian dari struktur pertahanan dan keamanan Dewan Keamanan Nasional (NSC), juga dikenal sebagai Milli Guvenlik Krelu (MGK) di Turki. Ini adalah lembaga pemerintah yang ditunjuk oleh Presiden Turki untuk menangani keamanan nasional dan berfungsi sebagai penyelaras dasar keselamatan antara kementerian. Pada tahun 1933, Dewan Pertahanan Tertinggi memulai reformasi keamanan nasional Turki. Sehingga saat ini, sistem yang bertanggung jawab atas keamanan negara telah berubah dan masih berkembang. Dewan koordinator tertinggi, NSC, berkumpul di bawah forum konstitusi setiap dua bulan untuk membahas ancaman terhadap keamanan negara. Undang-undang Nomor 29 tanggal 9 November 1983, yang mengacu pada UUD 1982, membentuk Dewan Keamanan Nasional (NSC) Turki. Organisasi ini diketuai oleh presiden dan memiliki sepuluh anggota, salah satunya adalah presiden, menteri kehakiman dan menteri keuangan. Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Kepala Staf TNI, dan Panglima TNI (Darat, Laut, Udara).

Di tahun 2003, konsep keamanan di negara Turki mengacu pada negara Eropa dan berfokus pada terorisme dan proliferasi nuklir, kehancuran massal, konflik regional, ancaman kriminal antar negara, epidemi, dan masalah lingkungan. Tujuan dari pembaharuan yang dilakukan Turki adalah untuk meningkatkan kontrol sipil atas militer dan membatasi pengaruhnya dalam politik. Strategi Keselamatan Eropa 2003 memfokuskan terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, konflik regional, kejahatan internasional, ancaman sosial ekonomi, pandemic, epidemi, dan masalah lingkungan untuk membentuk visi keamanan Turki. Turki melakukan pembaharuan untuk berpartisipasi dalam politik Uni Eropa, mengukuhkan kontrol sipil atas militer dan membatasi peran militer dalam politik.

Dengan mempertimbangkan perkembangan keamanan negara di beberapa negara di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis ancaman keamanan dan pertahanan saat ini termasuk terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, kejahatan siber, epidemik, pandemi sosial ekonomi, dan terorisme. Undang-undang keselamatan negara sangat penting untuk mengidentifikasi ancaman baru dan memungkinkan organisasi bekerja sama dan berkolaborasi untuk menghadapi ancaman yang bervariasi.

KESIMPULAN

1. Manfaat ketahanan nasional bagi Masyarakat, bahwa Masyarakat pada hakikatnya membutuhkan rasa aman dalam melangsungkan hidupnya. Kemudian manusia dalam menjalani kehidupan berada pada derajat yang lebih tinggi dibandingkan makhluk sosial yang hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Kekuatan pertahanan dan ketahanan nasional suatu negara meliputi seluruh sumber daya, militer dan non-militer, sumber daya alam, sumber alam, sumber buatan manusia dan kemudahan fasilitas pendukung, sains dan wilayah dalam mencapai tujuan negara. Keamanan, keselamatan dan pertahanan negara adalah bahagian terpenting dalam memastikan daya tahan nasional negara.
2. Jenis ancaman yang terjadi saat ini terhadap pertahanan dan keamanan negara Indonesia diantaranya adalah sengketa perbatasan, konflik di Laut Cina Selatan, kelompok kriminal bersenjata separatis dan intoleransi SARA. Korupsi, pembalakan liar, penangkapan ikan, perdagangan manusia, pekerja anak, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, terorisme dan ekstremisme, ancaman dunia maya, persyaratan peralatan pertahanan yang tidak memadai untuk Kekuatan Pokok Minimum dan keamanan polisi masih menjadi masalah. Kondisi optimal belum terpenuhi, termasuk kemiskinan, PHK massal, infrastruktur yang belum berkembang, dan hasil pembangunan yang tidak merata. Persamaan antara konsep

keamanan dan perlindungan dapat dilihat dari segi regulasi dan konsepnya. Ketentuan mengenai konsep keamanan dan pertahanan didasarkan pada Pancasila, sedangkan kedua konsep tersebut berdasarkan pada alinea 4 Pembukaan UUD 1945. Perbedaan konsep keamanan dan pertahanan bersumber dari UUD dan lembaga-lembaganya. Peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan keamanan dan perlindungan mengatur tugas dan tanggung jawab TNI dan Polri sebagai aparat keamanan. Secara kelembagaan, Kementerian Pertahanan bertanggung jawab atas operasi TNI, dan presiden bertanggung jawab langsung atas kepolisian. Beberapa negara, seperti Uni Eropa, Jepang, dan Turki, memiliki undang-undang keamanan nasional yang mengatur lembaga untuk memerangi ancaman dengan membentuk dewan keamanan nasional. Sistem keamanan nasional bertanggung jawab untuk melindungi negara dari segala ancaman dan gangguan, serta menjaga stabilitas dan keamanan pertumbuhannya.

SARAN

1. Dalam menciptakan keamanan bahwa konsep keamanan nasional harus dirumuskan dengan jelas. Ruang lingkup konsep ini juga menentukan aktor keamanan mana yang terlibat dalam menciptakan ancaman dan beradaptasi seiring dengan berkembangnya ancaman tersebut. Mengingat dinamika ancaman saat ini dan masa depan, maka pemerintah harus mempunyai landasan hukum untuk menangkal, mencegah, melindungi negara atas ancaman terkait keamanan nasional. Dalam membangun sistem pertahanan, keamanan, keselamatan nasional, perlu segera menetapkan undang-undang keamanan nasional, merumuskan pedoman strategis penyelenggaraan keamanan nasional, mengintegrasikannya dengan seluruh lembaga keamanan terkait dan menyetujuinya dibentuk Dewan Keamanan Nasional untuk mengkoordinasikan badan-badan keamanan negara.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan tentang bagaimana para pengambil keputusan memiliki visi dan misi yang sama dalam hal ketahanan dan keamanan nasional. Jika tidak, Anda diharapkan dapat memberikan pendapat Anda dan penelitian secara menyeluruh tentang penerapan undang-undang keamanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Lemhannas, 2016, Modul Penelitian Geostrategi dan Ketahanan Nasional, Jakarta: Lemhannas.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2019, Proyek Teknis RPJMN 2020-2024 untuk Indonesia Berpenghasilan Menengah Atas yang Sejahtera, Berkeadilan dan Berkelanjutan, Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Pranowo Bambang M, 2010, Ketahanan Nasional Multidimensi, Jakarta: Perpustakaan Alvabet: Jakarta.
- United Nations Trust Fund for Human Security (UNTFHS)*, 2016, Buku Panduan Keamanan Manusia: Pendekatan Terpadu Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dan Area Prioritas Bagi Komunitas Internasional Dan Sistem PBB, New York: United Nations.

Artikel Seminar/Jurnal/Website (Apa Style) :

- Adyatama Egi, 3 Desember 2019, Prabowo: Industri Pertahanan Swasta dan Negara Bisa Bekerja Sama, dimuat dalam <https://nasional.tempo.co/read/1279523/prabowoindustri-private-and-state-can-walk-together>.
- BBC News, 9 Desember 2018, Penembakan Nduga: Beda dengan teroris, gerilyawan Papua punya 'hubungan dengan warga,' dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46498239>.

Darusman Mulyana Yoyon, 2022, Dampak Kemajuan Teknologi Di Bidang Teknologi Informasi Terhadap Kedaulatan Wilayah Negara Indonesia, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.9, Universitas Pamulang.

Prasetia Andhika, 25 Oktober 2019, Jokowi menugaskan Wakil Menteri Pertahanan Trenggono untuk membidangi pengembangan industri pertahanan, dimuat dalam <https://news.detik.com/berita/d-4759528/jokowi-taskan-wamenhan-trenggonokembangkan-industry-per-prison>.